KONSTITUSIONALITAS PASAL 222 UU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU (*PRESIDENTIAL TRESHOLD*)

Taufiqurrohman Syahuri¹, Muhammad Helmi Fahrozi²
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
E-mail: tsyahuri@gmail.com¹

ABSTRAK

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia adalah mekanisme kedaulatan rakyat yang dilaksanakan melalui pemilihan umum, mekanisme ini harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Konstitusi) serta menjunjung tinggi asas demokrasi. Indonesia sebagai Negara Hukum di amanahkan oleh undang-undang agar Mahkamah Konstitusi dapat menjadi penjaga konstitusi dengan baik apabila terdapat peraturan perundang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi (*inkonstitusional*), termasuk konstitusionalitas pemilihan kepala negara yang telah di atur dalam Konstitusi Pasal 6A ayat 1. Penulisan yang diteliti melalui pendekatan Yuridis normatif dan empirik ini melihat bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden telah diatur mekanismenya pada Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, salah satu mekanismenya adalah di bentuknya ambang batas minimum pasang calon Presiden dan Wakil Presiden sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Prinsipnya penulisan ini memberikan sudut pandang bahwa pembatasan yang diatur dalam regulasi pemilihan umum tentang dukungan yang dibatasi tersebut belum memiliki spirit demokrasi, selain itu juga ambang batas lebih baik diatur menggunakan ambang batas maksimum, sehingga mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden dapat senafas dengan amanat konstitusi pasal 6 ayat 1 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Kata Kunci : Presidential Treshold, Konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu.

ABSTRACT

The President and Vice Presidential election in Indonesia is manifestation of people's sovereign. In that regards, it mechanism should be implemented in accordance with the UUD 1945 Constitution and be based on democratic values. This paper explores the role of Constitutional Court in settling the dispute on presidential treshold. This paper examines the relevancy between Art. 6A paragraph 1 UUD 1945, The role of Constitutional Court, and democratic values on the implementation of presidential treshold. In short, this paper analyzed the constitutionality of Art. 222 UU 7/2017 Election Law.

Keywords: Presidential treshold, constitutionality, art. 222 Election Law.

¹(Dosen Hukum Tata Negara UPN Veteran Jakarta)

²(Dosen Hukum Tata Negara UPN Veteran Jakarta)

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

James Bryce mendefinisikan konstitusi sebagai suatu kerangka masyarakat politik (negara) yang diorganisir dengan dan melalui hukum. Hukum menetapkan adanya lembaga-lembaga permanen dengan fungsi yang telah diakui dan hak-hak yang ditetapkan.³ Konstitusi atau sering disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴ Konstitusi sejatinya merupakan perjanjian masyarakat atau kontrak sosial untuk mendirikan suatu negara yang akan dikelola berdasarkan perjanjian tersebut, salah satu bukti bahwa konstitusi adalah sebuah perjanjian dapat di temukan dalam keilmuan sejarah literatur Islam, conothnya demi membangun peradaban manusia pada suatu bangsa dan negara, perjanjian dibuat dari beberapa kelompok penduduk di kota madinah sehingga disebut dengan Piagam Madinah (*Madinah Charter*)⁵.

Sebagai suatu perjanjian maka secara hukum wajib dilaksanakan oleh seluruh komponen warga negaranya, tidak hanya masyarakat namun juga dipatuhi oleh pemerintah di semua posisi sebagai penyelenggara negara. Konstitusi juga memiliki banyak fungsi antara lain (1) fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara, (2) fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara, (3) fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara, dan (4) fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara.⁶

Konstitusi dalam sebuah negara memiliki sifat yang fundamental, sehingga tidak ada satu negarapun yang tidak memiliki konstitusi.⁷ Urgensi kepemilikan konstitusi dalam sebuah negara dapat menjembatani akan adanya pembatasan bagaimana sebuah kekuasaan negara atau kekuasaan pemerintah di selenggarakan, dalam arti lain kekuasaan pemerintah dapat melaksanakan sifat formiil yang untuk mengatur dan memutus kekuasaan (*verordnungs- und entscheidungsgewalt*), Selain itu Konstitusi menjalankan sifat materiil yang artinya pelaksana roda pemerintahan negara memiliki dua unsur utama yaitu memerintah dan menyelenggarakan (*elements der regierung und das der vollziehung*).⁸

Pada umumnya materi konstitusi mencakup tiga hal yang fundamental yaitu: pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warganya; kedua, ditetapkannya ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; dan ketiga, adanya pembagian

³ Dahlan Thaib, et, al., *Teori Hukum dan Konstitusi*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1999) hal. 12

⁴Konstitusi memiliki banyak padanan bahasa dari berbagai negara, sepeti di inggris menggunakan istilah Constitution, di Prancis dengan istilah *Constituer* ataupun padanan yang lain yaitu *grondwet*, *grundgesetz*, *verfassung* dan lain-lain. dan makna konstitusi di indonesia di sebut dengan Undnag-undang Dasar,Lihat, Widodo Eka Tjahajana, *NEGARA HUKUM, KONSTITUSI DAN DEMOKRASI: Dinamika Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jember; Jember University Press, 2015) hal. 4.

⁵Tahir Azhary,*Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa kini*, cetakan kedua, (Jakarta; Kencana, 2004), hal. 12

⁶Astim Riyanto menambahkan bahwa konstitusi berfungsi sebagai penjamin kepastian hukum dalam praktek penyelenggaraan negara. Lihat, Astim Riyanto, *Teori Konstitusi* (Bandung; Yapendo, 2000) hal. 344

⁷ Soemantri, *Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Bandung; Alumni, 1987) hal. 57

⁸Attamimi, *Peran Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan negara*, (Jakarta, Disertasi UI 1990) hal. 15

dan pembatasan tugas kekuasaan ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.⁹ Untuk yang ketiga, pembagian dan pembatasan kekuasaan ini berarti mengandung maksud ada pemilik asli kekuasaan sebelum dilakukan pembagian. Ini sejalan dengan fungsi konstitusi yang disebut di atas, yakni sebagai pengalih sumber kekuasaan asli kepada organ negara.¹⁰ Siapa pemilik asli kekuasaan itu. Sesuai sistem konstitusi UUD 1945, pemilik kekuasaan asli adalah rakyat,¹¹ sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 kedaulatan berada di tangan rakyat dilaksanakan menurut UUD ini.

Kedaulatan atau kekuasaan rakyat tersebut kemudian dibagi atau didelegasikan kepada organ-organ negara, seperti untuk kekuasaan legislatif didelegasikan kepada dewan dan presiden dalam rangka pembentukan undang-undang. Kekuasaan yudikatif didelegasikan kepada organ negara kehakiman. Jadi sesungguhnya organ negara tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Mereka menjadi memiliki kekuasaan karena diberikan oleh pemegang kekuasaan asli. Khusus kekuasaan rakyat untuk memilih presiden dan wakil presiden tidak dilimpahkan kepada organ lain, melainkan tetap dipegang sendiri oleh rakyat dengan melalui mekanisme pemilihan langsung. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat (Pasal 6A ayat 1).

Namun untuk menentukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, pemilik kekuasaan asli telah memberikan delegasi kepada organ partai politik hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon tersebut, sebelum dilakukan pemilihan secara langsung sebagaimana disebut dalam Pasal 6A ayat (2) yaitu pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Pemberian pelimpahan kekuasaan oleh pemegang kekuasaan asli kepada organ partai politik mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden itu tentunya bersifat limitatif¹² sesuai bunyi rumusan ayat tersebut sehingga tidak mungkin dilakukan penafsiran oleh pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden), yang memang diperintahkan oleh UUD 1945 dalam Pasal 6A ayat (5) dengan rumusan “tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang”. Disini pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang memiliki kewenangan mengatur tata cara pemilihan secara langsung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Persoalannya adalah bolehkah pembentuk undang-undang itu leluasa menentukan persyaratannya tanpa mendasari pada asas dan prinsip pemilihan umum, yakni asas demokrasi yang memberikan kesempatan yang sama kepada warga negaranya dalam hukum dan pemerintahan tanpa kecuali sebagai ditentukan pada Pasal 27 UUD

⁹Soemantri, *Op. Cit. hal. 57 - 60.*

¹⁰Fungsi pengalihan konstitusi dari rakyat yang berbentuk negara republik dalam sistem demokrasi maupun rakyat yang di pimpin oleh Raja dalam bentuk negara monarki kepada kodifikasi hukum seperti konstitusi juga dapat dilihat pada, Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan kedua, (Jakarta; Sekjen Kepaniteraan dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006) hal. 24

¹¹Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, (Jakarta; Aksara Baru, 1994) hal. 8

¹² Tidak sedikit pendapat ahli berbicara tentang sifat limitatif dalam konstitusi, salah satu pemahaman ahli tentang konstitusi memberi pandangan lain bahwa tidak hanya pembagian kekuasaan saja yang bersifat limitatif dalam konstitusi, selain itu adalah pertama, kewenangan publik (*public authority*), pada prinsipnya kewenangan tersebut haruslah berdasarkan legitimasi konstitusi, kedua penerapan kedaulatan rakyat yang di jalankan berdasarkan pemilihan eksekutif yang bersifat universal dan demokratis, ketiga adanya kebebasan kekuasaan kehakiman dan terakhir sistem konstitusi yang dapat menjaga keseimbangan atau mengontrol badan serta lembaga pihak kepolisian serta militer demi penegakkan hak rakyat dan supremasi hukum, Lihat Bambang Widjojanto, *Reformasi Konstitusi : Sebuah Keniscayaan*, Majalah Detak, No. 014 Tahun ke 1, tanggal 13 - 19 Oktober 199.

1945, Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Undang-undang No 7 Tahun 2017 yang telah disahkan oleh pembentuk undang-undang jelas melanggar asas demokrasi yang telah di cita-citakan pasca reformasi bahwa akan menjadi lebih baik. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 222 yang jauh dari realita demokrasi, Pasal ini memberikan pembatasan bahwa Pasangan Calon Presiden dari partai politik maupun dari gabungan partai politik harus memenuhi persyaratan ambang batas Perolehan kursi paling sedikit dua puluh persen dari jumlah atau memperoleh dua puluh lima persen dari suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Ketentuan ini berbanding terbalik dengan kebebasan hak warga negara yang telah di atur konstitusi, dan menciptakan negara Indonesia menjadi lebih dalam bernegara hokum yang demokratis, yang mana bebas dari pembatasan terhadap warga negaranya yang ingin menjadi bagian dari saut pemerintahan melalui sistem perwakilan, sistem pengawasan dan sistem pengujian terhadap bentuk tindakan dan keputusan penguasa negara.¹³

1.2. Metode Penelitian

Konstruksi penelitian ini di bangun secara sistematis, melalui pendekatan perundang-undangan dan dibangun secara yuridis normatif, penulis mengumpulkan beberapa regulasi atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan diselesaikan pada penelitian ini. Kemudian penelitian ini dianalisa dan dijelaskan kembali melalui penelusuran sumber kepustakaan (*library research*) dari berbagai macam asas–asas hukum dan teori–teori hukum dan literature yang lainnya. Sehingga keterkaitan antara regulasi yang telah terbentuk dengan sumber data-data yang lengkap dan relevan dari kepustakaan, akan meberikan jawaban mengenai pembatasan pemilihan presiden (*Presidentia lThreshold*) yang telah diatur melalui peraturan perundang-undangan. artinya regulasi yang masih berlaku diperlukan perbaikan agar mengakomodir spirit demokrasi yang telah berjalan selama dua puluh tahun lebih, serta sesuai dengan amanat konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*Konstitutional*)

2. PEMBAHASAN

2.1. Ambang Batas Presiden Dalam Wajah Demokrasi Di Indonesia

Sebagai wujud dari kedaulatan rakyat dibuatnya regulasi pemilihan umum adalah ruang untuk mencari kepastian terhadap perpindahan tapuk kepemimpinan dan kekuasaan yang lama kepada kepemimpinan dan kekuasaan pemerintahan yang baru berdasarkan hukum, makna ini sangat fundamental bahwa kepemimpinan yang dilahirkan dari suara rakyat adalah pemimpin yang muncul dari kepercayaan rakyat melalui pelembagaan sistem perwakilan (*Transfer of Leader and Power*)¹⁴, dengan bahasa lain Jimly Asshidiqie mengistilahkan proses tersebut untuk mencari pemimpin agar lebih teratur.¹⁵

Dalam hukum administrasi negara atau tata pemerintahan perputaran kekuasaan dalam suatu negara untuk mencari kepala negara sekaligus kepala pemerintahan seperti di Indonesia dilaksanakan memalui proses pemilihan umum sehingga menciptakan citra rotasi politik yang terbuka dan transparan.¹⁶ Sukarja menafsirkan bahwa sistem pemilihan

¹³ Widodo Ekatjahjana, *Negara Hukum, Konstitusi dan Demokrasi: Dinamika dalam Penyelenggara Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jember, Jember University Press, 2015) hal. 62

¹⁴ Matori Abdul Djaliil, *Tuntutan Reformasi dan Penyelenggara Pemilu 1999 dalam masa Transisi* (Jakarta: KIPP, 1999) hal. 34

¹⁵ JimlyAsshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta, BIP, 2008), hal. 752

¹⁶ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014) Hal. 70

umum menghasilkan logika politik atas tata laksana administrasi, berjalannya birokrasi, hingga tumbuh dan berkembangnya *civil society* dalam sebuah negara, atas dasar tersebut proses pemilihan umum menjadi sebuah keniscayaan dalam mencari pemimpin.¹⁷ Secara administrasi negara saat ini terkait memilih pemimpin telah diatur syarat untuk dapat mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden, salah satu syaratnya adalah melewati ambang batas (*Presidential Threshold*)¹⁸. Artinya apabila warga negara ingin menjadi seorang Presiden dan berpasangan dengan Wakil Presiden yang dicalonkan melalui kendaraan partai politik harus melampaui ambang batas yang telah ditentukan¹⁹. Banyak tokoh partai politik yang menyepakati bahwa *Presidential threshold* atau ambang batas Presiden dan Wakil Presiden memiliki tujuan yang jelas yaitu untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensiil.²⁰ Aktualisasi ambang batas yang di berikan kebijakan oleh pembentuk undang-undang sebagai jaminan Eksekutif dapat menjadi lebih kuat dan stabil dianggap harus direalisasikan, sehingga suara pada legislatif yang cukup masif, dan partai-partai yang telah teruji pada pemilihan umum sebelumnya dapat dimaksimalkan dan bermanfaat bagi kekuasaan eksekutif membuat *legal policy*.²¹

Regulasi tersebut justru tidak serta merta dapat diterima oleh masyarakat luas, bahkan dari kalangan politisi sendiri yang bertuas menjadi pembentuk undang-undang banyak yang tidak sependapat. sehingga terjadi perbedaan suara yang signifikan antara kelompok yang ingin sama sekali tidak menggunakan ambang batas 0% (Nol Persen) dengan kelompok suara legislatif yang menginginkan ambang batas 20% (Dua Puluh Persen).²² Sepakat dengan Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menginginkan tiadanya ambang batas untuk Presiden dan Wakil Presiden, Refly Harun menegaskan bahwa secara kondisional dan Faktual yang pernah terjadi di Indonesia, ketika paradigma dasarnya bahwa *Presidential Threshold* untuk memperkuat sistem presidensiil, justru yang terjadi sebaliknya, hubungan ambang batas untuk memperkuat presidensiil itu tidak ada relevansinya.²³

Sejarah pernah mencatat bahwa sesungguhnya pembentukan regulasi terkait *Presidential Threshold* itu tidak menjamin sistem presidensial murni, yang kemudian sistem pemerintahan tersebut akan menjadi kuat seutuhnya, masih jelas ingatan sepertinya ketika saat kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono ditahun 2009-2012 pada periode kedua. pernah memiliki koalisi dukungan partai di parlemen yang cukup besar. Namun, saat itu

¹⁷ Ahmad Sukarja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hal. 155

¹⁸ Melihat konteks mekanisme yang ada tentang ambang batas, prinsipnya dapat di tafsirkan bahwa pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diharuskan melampaui ambang batas dari DPR, perolehan suara yang banyak dan perolehan kursi yang besar dapat menentukan apakah salah satu partai atau gabungan partai politik dapat mencalonkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Lihat, Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, (Yogyakarta, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2009) hal. 19

¹⁹ Lihat Pasal 222 Undang-undang Pemilihan Umum No 7 Tahun 2017

²⁰ *PDIP: Presidential Threshold Penting Agar Pemerintahan Efektif* <https://news.detik.com/berita/d-3396237/pdip-presidential-threshold-penting-agar-pemerintahan-efektif>

²¹ *Pentingnya "Presidential Threshold" Menurut Golkar* <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/06/12172641/pentingnya.presidential.threshold.menurut.golkar>

²² *Gerindra Ngotot Tolak Ambang Batas Capres, Ini Alasannya* <https://news.detik.com/berita/3510408/gerindra-ngotot-tolak-ambang-batas-capres-ini-alasannya>

²³ Pengamat : Aturan Pilpres 2019 Aneh ! <https://www.kordanews.com/28351/pengamat-aturan-pilpres-2019-aneh/>

tetap saja kebijakan yang di keluarkan pihak eksekutif tidak sepenuhnya didukung oleh partai koalisinya sendiri,²⁴

Perbedaan pendapat tentang kebijakan publik untuk memberikan ambang batas sebagai syarat pencalonan kepala negara adalah hal yang wajar dalam berdemokrasi. Kebijakan yang diinsiasi oleh pembentuk undang-undang adalah wujud dari demokrasi melalui kanal sistem perwakilan, Lembaga legislative yang lahir dari rahim rakyat, dan saat kebijakan artinya hasil kebijakan tersebut adalah hasil demokratisasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁵ Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembentuk Undang-undang adalah salah satu harapan masyarakat untuk memfasilitasi bahwa demokrasi dapat terpenuhi dan berjalan sebagaimana mestinya. Jika demokrasi itu hasilnya menjadi terbentuknya syarat ambang batas untuk memberikan pasangan calon pemimpin negara, hal ini bertolak belakang dengan harapan warga negara. Terganjalnya warga negara mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemilihan umum tersebut jangan dianggap hal enteng atau sepele dengan argumen bahwa hal itu merupakan pilihan politik hukum (*legal policy*) pembentuk undang-undang.

Benar memang semua muatan materi undang-undang sepanjang tidak disebut dalam konstitusi, merupakan kewenangan/hak pilihan politik hukum pembentuk undang-undang, karena sesuai dengan sifatnya sebagai hukum dasar, UUD pasti hanya merumuskan norma hukum yang sifatnya garis besar dan prinsip saja, lalu kemudian undang-undanglah yang bertugas memberikan penafsirannya.

Namun demikian hak dan kewenangan dalam pembentukan undang-undang itu tidak berarti boleh digunakan sesukanya, pembentuk undang-undang wajib mentaati rambu-rambu UUD dalam merumuskan undang-undang. Rumusan yang sekiranya patut diduga sedemikian rupa menurut penalaran akal sehat akan mengganjal prinsip demokrasi dan hak konstitusional warga sudah seharusnya wajib dihindari. Jikalau pembentuk undang-undang memaksakan diri demi kepentingan kelompoknya sehingga rumusan sebuah undang-undang mengganjal prinsip demokrasi dan hak konstitusional warga serta menutup sama sekali kesempatan warga untuk mendaftar sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden, maka sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi, penjaga demokrasi dan pelindung jaminan hak asasi manusia, tiada kata lain, kecuali mencoret rumusan yang mengganjal itu.

2.2 Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mengkoreksi Pasal 222 Undang-Undang Dan Batasan Maksimal Dukungan

Salah satu cita-cita reformasi adalah mewujudkan penegakan supremasi hukum dan penghormatan kepada hak asasi manusia,²⁶ pemenuhan cita-cita tersebut menjadi dasar perubahan konstitusi sejak 1998, baik pada perubahan konstitusi pertama maupun hingga perubahan tahap keempat pada tahun 2002. Dalam proses perubahan konstitusi Indonesia, terdapat hal yang paling mendasar yakni, secara politis pemerintah memilih untuk menciptakan karakteristik negaranya sebagai negara hukum (*rechtstaat*), dan bentuk hukum paling tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

²⁴ *Tolak Kenaikan BBM, PKS Isyaratkan Keluar dari Koalisi Pemerintahan SBY* <https://news.detik.com/berita/1877931/tolak-kenaikan-bbm-pks-isyaratkan-keluar-dari-koalisi-pemerintahan-sby>

²⁵ Umu Rauta, Mengagas Pemilihan Presiden yang demokratis dan Aspiratif, Jurnal Konstitusi Bolume 11 Nomor 3 (Jakarta, Mahkamah Konstitusi 2014) hal.

²⁶ Satya Arinanto, *Politik Pembangunan Hukum Nasional Dalam Era Pasca Reformasi*: Jurnal Konstitusi, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hal. 73

1945, atau yang umum disebut sebagai konstitusi. Konstitusi adalah titik pusat kekuasaan baik secara praktis maupun teoritis²⁷, Institusi besar bernama Mahkamah Konstitusi ditugaskan sebagai pengawal konstitusi (*The Guardian of Constitution*). Lembaga peradilan yang di junjung tinggi akan hasil keputusan hukumnya menjadi dasar berbagai proses hukum dan Politik yang ada di Indonesia. Sebagai salah satu hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi menegaskan bahwa lembaga yang lahir di era reformasi ini adalah lembaga yang dapat dipertanggung jawabkan kemandiriannya (*Independency*).

“Mahkamah Konstitusi mempunyai visi menegakkan konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Kemudian salah satu misi Mahkamah Konstitusi adalah mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang terpercaya. Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu mengembalikan citra lembaga peradilan di Indonesia sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka (*independence*) yang dapat dipercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan”²⁸

Berdiri di atas kemandiriannya, Mahkamah Konstitusi tegas memutuskan untuk menolak pengajuan pengujian Undang-undang tentang Pemilihan Umum terkait ambang batas pencalonan sebagai syarat mengajukan kandidasi Presiden dan Wakil Presiden melalui nomor putusan perkara 70/PUU-XV/2017. Kritik terhadap putusan tersebut sangat massif muncul dari masyarakat baik dari praktisi (partai politik) maupun dari para akademisi dan penggiat demokrasi. Kritik yang muncul misalnya telaah pada pendekatan teori keadilan yang didasari oleh aliran mazhab hukum *sociological jurisprudence*.²⁹ Berdasarkan aliran ini putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menghilangkan hukum yang seharusnya dapat berkembang secara maksimal. Perkembangan hukum yang maksimal adalah hukum yang dapat bermanfaat ditengah kehidupan masyarakat, salah satu indikatornya adalah hukum dapat melindungi setiap hak asasi manusia.

Mochtar Kusumaatmadja telah membuktikan sejak dirinya terpilih menjadi menteri Kehakiman di era Presiden Soeharto, bahwa hukum prinsipnya dapat menjadi suatu alat untuk pembangunan sebuah negara,³⁰ dimana unsur sebuah negara adalah masyarakat (manusia), maka hukum tidak akan maksimal apabila pembentukan dan pemberlakuan hukum tersebut tidak sejalan dengan cita-cita masyarakat ketika seluruh faktor kehidupan berbangsa dan bernegaranya diatur hukum yang dibentuk secara sewenang-wenang keinginan pembentuk undang-undang.

Hasil putusan MK tersebut menurut analisa penulis akan menimbulkan peniadaan hak konstituional warga negara (*citizen constitutional rights*) yang tidak dilindungi oleh negara, melalui lembaga yang seharusnya dapat mengakomodir seluruh hak asasi manusia

²⁷ Brian Thompson sebagaimana dikutip oleh Jimly mengatakan “*a constitution is a document which contains the rules for the operation of an organization*”, Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta; Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi) hal. 113.

²⁸ Ahmad Fadlil Sumadi, *Independensi Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 5, (Jakarta, Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia, 2011), hal. 632-646.

²⁹ Sociological Jurisprudence yang lebih mengarahkan perhatiannya pada ”kenyataan hukum” daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat, Marsudi Dedi Putra, *Kontribusi Aliran Sociological Jurisprudence Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Indonesia, Likhitaprajna*. Jurnal Ilmiah.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ISSN: 1410-8771. Volume. 16, Nomor 2, hal 45-59

³⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung; PT Alumni, 2006) hal. 33

yang telah diatur oleh konstitusi, dan lembaga pengawal konstitusi dapat dianggap masyarakat membiarkan hak konstitonal warga terdegradasi oleh undang-undang yang dibentuk oleh pemerintah dengan tanpa mengakomodir seluruh hak hak konstituional warga negara demi menciptakan suasana yang kondusif dalam berdemokrasi, padahal dalam konsep negara hukum negara seharusnya wajib melindungi hak-hak konstituional warga negaranya.

Prinsip konstitusi untuk melindungi hak-hak konstituional warga negaranya adalah prinsip yang sangat fundamental, semua regulasi dasar sebuah negara (konstitusi) tidak ada yang tidak menuliskan dalam materi muatannya tentang perlindungan hak asasi manusia, bahkan di Indonesia berlanjut kepada Undang-undang tertentu untuk mengatur hak asasi manusia tertentu, misalnya saja hak asasi manusia untuk menyatakan berpendapat atau hak dalam mendapatkan pendidikan yang layak, hal ini hanya untuk satu tujuan mendasar, bahwa di era reformasi masyarakat dapat menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara dengan terpenuhi seluruh hak asasi manusianya.

Diskursus pembatasan syarat menjadi presiden dan wakil presiden di Indonesia menjadi hak sepenuhnya pembentuk Undang-undang, lembaga penjaga konstitusi memiliki kewenangan untuk dapat membatalkan apa yang sudah disahkan oleh kedua lembaga pembentuk undang-undang tersebut, yakni lembaga pada kekuasaan kesekutif dan lembaga pada kekuasaan legislatif. Dua kekuasaan dalam pemerintahan ini sangat memungkinkan menciptakan kebijakan yang otoriter, jika Mahkamah Konstitusi tetap melanjutkan pemberlakuan ambang batas persyaratan menjadi Presiden dan wakil presiden menurut penulis sangat kurang baik dan tidak menutup kemungkinan memberikan preseden yang buruk di kemudian hari

Prinsipnya Mahkamah Konstitusi sangat *eligible* untuk menyelesaikan problematika yang penulis angkat dalam artikel kali ini. Pada Pasal 222 UU Pemilu itu dimaknai bahwa sebelum partai politik dan atau gabungan partai politik yang memenuhi pembatasan tersebut menandatangani dan mengusulkan calonnya, dilakukan penjaringan bakal calon secara terbuka³¹ kepada warga negara. Penjaringan ini harus dilakukan secara obyektif, transparan. Partisipatif dan akuntabel. Persis seperti dalam rekrutmen pejabat negara seperti hakim MK, Hakim Agung dan KPK. Rekrutmen ini tidak menghalangi warga negara yang berkeinginan untuk ikut mendaftar sebagai Pejabat negara.

Pembatasan dukungan Presiden atau *Presidential Treshold* (PT) tidak konstitusional jika dilakukan seperti selama ini, tertutup hanya monopoli kekuasaan partai politik, tanpa dibarengi dengan pengaturan tata cara rekrutmen bakal pasangan calon yang tidak mengganjal prinsip demokrasi dan hak asasi sesuai UUD.

Demikian juga pengaturan PT tidak bertentangan dengan UUD apabila pengaturan PT itu merupakan batas maksimal dukungan, bukan batas minimal seperti yang ada di Pasal 222 UU Pemilu. Bahkan batas maksimal dukungan ini penting sebagai batasan untuk menghindari adanya pasangan calon tunggal. Kemungkinan dapat saja terjadi tanpa pembatasan maksimal dukungan, seluruh partai politik dapat bersatu suara hanya mengusulkan satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tentu saja hal itu jika benar terjadi hanya ada satu pasangan calon dalam pemilu presiden dan wakil presiden, sangat tidak elok bagi pemilu yang demokrasi, sungguhkan disadari dari sisi pandang demokrasi tidak diharamkan.

³¹ misal pada pilpres 2004 dan 2009, terlihat bahwa partai politik dan atau gabungan partai politik melakukan penjaringan dan penyaringan calon presiden dan wakil presiden, namun memang masih secara terbatas dan difatnya sangat elitis, Umu Rauta, Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014 h. 600 - 616

3. Kesimpulan Dan Penutup

Pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu 2017 terutama di anak kalimat yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelumnya menggajal asas demokrasi dan juga hak konstitusional warga negara. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi serta penjamin terlaksananya hak asasi warga, wajib mengoreksi Pasal 222 UU Pemilu 2017 sehingga tidak menganjal asas demokrasi yang dijunjung tinggi konstitusi.

Pembatasan dukungan yang sebenarnya perlu diatur adalah pembatasan dukungan maksimal, demi menghindari pasangan calon tunggal. Kewenangan pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik, penting diatur mekanisme rekrutmennenyadengan prinsip obyektif, transparan, partisipatif dan akuntabel karena cara demikian lebih sesuai dengan spirit demokrasi dan amanat konstitusi.

Daftar Pustaka

- Azhary Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa kini*, cetakan kedua, (Jakarta; Kencana, 2004),
- Arinanto Satya, *Politik Pembangunan Hukm Nasional Dalam Era Pasca Reformasi: Jurnal Konstitusi*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006),
- Asshiddiqie Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta; Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahakamah Konstitusi)
- Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi dan Konstituionalisme Indonesia*, Cetakan kedua, (Jakarta; Sekjen Kepaniteraan dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006)
- Asshiddiqie Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta, BIP, 2008),
- Dahlan Thaib, et, al., *Teori Hukum dan Konstitusi*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1999)
- Tjahjana Widodo, *Negara Hukum, Konstitusi dan Demokrasi: Dinamika dalam Penyelenggara Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jember, Jember University Press, 2015)
- Tjahajana, Widodo Eka, *NEGARA HUKUM, KONSTITUSI DAN DEMOKRASI: Dinamika Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jember; Jember University Press, 2015)
- Rauta Umbu, *Mengagas Pemilihan Presiden yang demokratis dan Aspiratif*, Jurnal Konstitusi Bolume 11 Nomor 3 (Jakarta, Mahkamah Konstitusi 2014)

Konstitusionalitas Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
(Presidential Treshold)

Sumadi Ahmad Fadlil, *Independensi Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 8,
Nomor 5, (Jakarta, Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia, 2011),

Riyanto Astim, *Teori Konstitusi* (Bandung; Yapendo, 2000)

Soemantri, *Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Bandung; Alumni, 1987)

H Attamimi, *Peran Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan negara*, (Jakarta, Disertasi UI 1990)

Suny Ismail, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, (Jakarta; Aksara Baru, 1994)

Djalil Matori Abdul, *Tuntutan Reformasi dan Penyelenggara Pemilu 1999 dalam masa Transisi* (Jakarta: KIPP, 1999)

Ilmar Aminuddin, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014)

Sukarja Ahmad, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyarah*, (Jakarta Sinar Grafika, 2014)

Pamungkas Sigit, *Perihal Pemilu*, (Yogyakarta, Laboraturium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2009)

PDIP: Presidential Threshold Penting Agar Pemerintahan Efektif
<https://news.detik.com/berita/d-3396237/pdip-presidential-threshold-penting-agar-pemerintahan-efektif>

Pentingnya "Presidential Threshold" Menurut Golkar
<https://nasional.kompas.com/read/2017/05/06/12172641/pentingnya.presidential.threshold.menurut.golkar>.

Gerindra Ngotot Tolak Ambang Batas Capres, Ini Alasannya
<https://news.detik.com/berita/3510408/gerindra-ngotot-tolak-ambang-batas-capres-ini-alasannya>

Pengamat : Aturan Pilpres 2019 Aneh ! <https://www.kordanews.com/28351/pengamat-aturan-pilpres-2019-aneh/>

Tolak Kenaikan BBM, PKS Isyaratkan Keluar dari Koalisi Pemerintahan SBY
<https://news.detik.com/berita/1877931/tolak-kenaikan-bbm-pks-isyaratkan-keluar-dari-koalisi-pemerintahan-sby>